

ANALISIS KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

Channifa Andini Fahri*), Satia Negara Lubis), Sinar Indra Kesuma**)**

- *) Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Jl. Prof. A. Sofyan No. 3 Medan.
Hp. 082363983273, E-mail : icca.alfahri@gmail.com
- **) Staf pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dan menemukan alternatif kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive. Data yang diambil adalah data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kecamatan Lima Puluh secara umum berada pada kategori tahan pangan. Dilihat dari dimensi ketersediaan pangan, sebanyak 11 desa berada pada kategori defisit tinggi, 1 desa berada pada kategori surplus sedang dan 23 desa berada pada kategori surplus tinggi. Dilihat dari dimensi akses pangan seluruh desa di kecamatan Lima Puluh berada pada kategori sangat tahan. dilihat dari dimensi pemanfaatan pangan seluruh desa di Kecamatan Lima Puluh berada pada kategori tahan.

Kata kunci : Ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the level of food security in Kecamatan Lima Puluh of Kabupaten Batu Bara and to find the alternatives of food security policy in Kecamatan Lima Puluh of Kabupaten Batu Bara. The method used in this research is descriptive analysis method. The location of this research is determined purposively. The data that taken and used in this research are secondary data. The results of the study concluded that Kecamatan Lima Puluh of Kabupaten Batu Bara is generally in the level of food resistant category. Judging from the dimensions of food availability, 11 villages are in the level of high food availability deficit category, 1 village is in the level of medium food availability surplus category and 23 villages are in the level of high food availability surplus category. Judging from the dimensions of food acces, all villages in Kecamatan Lima Puluh of Kabupaten Batu Bara are in the very resistant category. Judging from the dimensions of food utilization, all villages in Kecamatan Lima Puluh of Kabupaten Batu Bara are in the resistant category.

Keywords : Food Security, Food Availability, Food Acces, Food Utilization

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar dari suatu bangsa. Banyak contoh negara dengan sumber ekonomi cukup memadai tetapi mengalami kehancuran karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Menurut taksiran pada tahun 2050 nanti populasi penduduk di dunia mencapai 10 M meningkat sekitar 39% lebih tinggi dari populasi penduduk pada tahun 2000 (6,1 M), dimana sebagian besar kenaikan ini terpusat di negara-negara berkembang (Sembiring, 2015). Menurut BPS, jumlah penduduk Indonesia ditaksir sekitar 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49% per tahun, mengalami kenaikan dua kali lipat selama 40 tahun terakhir berdasarkan sensus penduduk pada tahun 1971-2010 (BKKBN, 2013).

Seiring dengan proses otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, peranan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya menjadi semakin meningkat. Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya (Suryana,2004).

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten Batu Bara

Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk(Jiwa)	Persentase penduduk(%)	Kepadatan Penduduk per Km2 (jiwa)
Sei Balai	92,64	27827	6,94	300
Tanjung Tiram	173,79	67492	16,84	388
Talawi	89,8	57860	14,44	644
Lima Puluh	239,55	89864	22,42	375
Air Putih	72,24	49776	12,42	689
Sei Suka	171,47	55570	13,86	324
Medang Deras	65,47	52414	13,08	801
Batu Bara	904,96	400803	100	443

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batubara, 2015

Kabupaten Batu Bara memiliki 7 wilayah kecamatan, kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Lima Puluh dengan luas wilayah 239,55 Km². Sebanyak 22,42% dari total penduduk Kabupaten Batu Bara atau sebanyak 89.864 jiwa pada tahun 2015 berdomisili di Kecamatan Lima Puluh, yang merupakan ibu kota Kabupaten Batu Bara dengan kepadatan penduduk sebanyak 375 jiwa per Km².

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketahanan pangan di Kecamatan Lima Puluh?
2. Bagaimana alternatif kebijakan pangan di Kecamatan Lima Puluh?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan di Kecamatan Lima Puluh.
2. Untuk menemukan alternatif kebijakan pangan di Kecamatan Lima Puluh.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (PP RI Nomor 17 tahun 2015).

Landasan Teori

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dan gizi yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (PP RI Nomor 17 tahun 2015).

Berdasarkan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Peta Ketahanan Pangan (2016), penentuan tingkat ketahanan pangan didasarkan pada 12 indikator yang merupakan faktor turunan dari 3 dimensi ketahanan pangan, yaitu :

1. Dimensi I : Ketersediaan Pangan

Indikator dari dimensi pertama adalah konsumsi per kapita normatif dibandingkan terhadap ketersediaan bersih beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

2. Dimensi II : Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan

Empat indikator berikutnya termasuk dalam dimensi akses terhadap pangan dan penghidupan, yaitu : a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, b) Persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasar, c) Persentase kepala rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas listrik, d) Persentase jumlah desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

3. Dimensi III : Pemanfaatan Pangan (Kesehatan dan Nutrisi)

Ada tujuh indikator dalam dimensi kesehatan dan nutrisi yang terdiri dari : a) Angka (umur) Harapan Hidup, b) Persentase anak yang tidak diimmunisasi secara lengkap (4 jenis immunisasi), c) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, d) Persentase anak balita dengan berat badan di bawah standar (gizi buruk dan kurang), e) Persentase perempuan buta huruf, f) Persentase populasi per dokter yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk.

Kebijakan Ketahanan Pangan

Kebijakan pemantapan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat kinerja subsistem yang terdapat dalam ketahanan pangan, serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk (Suyana, 2003).

Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk menangani kerawanan pangan transien (mendadak), kebijakan jangka menengah diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan kronis secara lebih efektif serta meningkatkan kemampuan dan

kemandirian dalam penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara berkelanjutan. Kebijakan jangka panjang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dan mendorong diversifikasi pangan, serta meningkatkan jaminan bagi setiap penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup (Suyana, 2003).

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartika Fitriana Theodora Panggabean dengan judul “Analisis Kerawanan Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2011” menunjukkan bahwa kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bogor sudah tergolong dalam kategori tahan pangan. Adapun rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor antara lain dilakukannya pemantauan jumlah rumah tangga miskin secara berkala untuk menghindari terjadinya kerawanan pangan di suatu kecamatan, peningkatan pelayanan dan kebutuhan air bersih yang cukup PDAM, peningkatan dan pengelolaan produksi hasil pertanian tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan yang belum diolah serta penyuluhan mengenai pentingnya gizi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rhemo Adiguno (2014) dengan judul “Analisis Akses dan Ketersediaan di Provinsi Sumatera Utara” diperoleh hasil bahwa situasi akses pangan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 termasuk dalam kondisi akses pangan cukup rendah. Tahun 2009 – 2012 kondisi akses pangan di Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kondisi cukup tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Daerah penelitian ini ditentukan secara *purposive*.

Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah metode survey.

Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel dengan langkah sebagai berikut :

1. Penghitungan Indeks Ketersediaan Pangan

Dalam penghitungan indeks ketersediaan pangan ini digunakan proporsi konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan pokok sumber karbohidrat yaitu netto padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang layak dikonsumsi manusia.

a. Padi

Adapun produksi netto beras dihitung sebagai berikut :

$$R_{\text{net}} = c \times P_{\text{net}}$$

$$P_{\text{net}} = P \times [1 - (s + f + w)]$$

Dimana :

R_{net} = Produksi netto beras

P_{net} = Netto Ketersediaan Padi

P = Ketersediaan Padi

s = Penggunaan padi untuk bibit

f = Penggunaan padi untuk pakan

w = Padi yang tercecer

c = Faktor konversi padi

b. Jagung

Adapun produksi netto jagung dihitung sebagai berikut :

$$M_{\text{net}} = M * c$$

Dimana :

M_{net} = Produksi netto jagung

M = produksi jagung

c = faktor konversi jagung

c. Ubi kayu dan ubi jalar

Adapun produksi netto ubi kayu dan ubi jalar dihitung sebagai berikut :

$$Uk_{\text{net}} = Uk * c$$

Dimana :

Uk_{net} = produksi netto ubi kayu

U_k = produksi ubi kayu
c = faktor konversi ubi kayu

Sedangkan untuk ubi jalar :

$$U_{j_{net}} = U_j * c$$

Dimana :

U_{j_{net}} = produksi netto ubi jalar

U_j = produksi ubi jalar

c = faktor konversi ubi jalar

d. Produksi Netto Pangan Biji-bijian

$$P_{food} = R_{net} + M_{net} + U_{net}$$

Dimana :

P_{food} = Produksi netto pangan biji-bijian dan umbi-umbian

R_{net} = Produksi netto beras

M_{net} = Produksi netto jagung

U_{net} = produksi netto ubi kayu dan ubi jalar

Untuk menghitung ketersediaan pangan biji-bijian per kapita per hari dihitung sebagai berikut :

$$F = \frac{P_{food}}{T_{pop} \times 365}$$

Dimana :

F = ketersediaan pangan biji-bijian per kapita per hari (gram)

P_{food} = produksi netto pangan biji-bijian dan umbi-umbian

T_{pop} = total populasi kelurahan (jiwa)

e. Penghitungan Rasio Ketersediaan Pangan

$$R_{cons} = \frac{C_{norm}}{F}$$

Dimana :

R_{cons} = indeks ketersediaan pangan

C_{norm} = Konsumsi normatif (300 gram/hari)

F = Ketersediaan Pangan Biji-bijian dan Umbi-umbian

f. Penghitungan Indeks Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Pemanfaatan Pangan

Semua nilai faktor/indikator akan dirubah ke dalam bentuk indeks untuk menstandarisasi ke dalam skala 0 -1.

$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{P-Q}{R(S+T)}$$

Dimana :

X_{ij} = Nilai ke -j dari faktor/indikator ke-i

P = Nilai faktor/indikator yang bersangkutan

Q = Nilai minimum faktor indikator yang bersangkutan

R = Selisih nilai rentangan faktor indikator yang bersangkutan

S = Selisih nilai rentangan indeks komposit ketahanan pangan

T = Nilai minimal rentangan indeks komposit yang bersangkutan

2. Penghitungan Indeks Gabungan Ketahanan Pangan

Indeks Gabungan Ketahanan Pangan (I_{FS}) dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$I_{FS} = 1/12 (I_{AV} + I_{POV} + I_{EDU} + I_{ELC} + I_{VIL} + I_{ILL} + I_{HF} + I_{DOC} + I_{IMM} + I_{WAT} + I_{AHH} + I_{NUT})$$

Dimana :

I_{AV} = Ketersediaan Pangan

I_{POV} = Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

I_{EDU} = Persentase kepala keluarga yang tidak tamat sekolah dasar

I_{ELC} = Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas listrik

I_{VIL} = Persentase jumlah desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4

I_{ILL} = Persentase perempuan buta huruf

I_{HF} = Persentase rumah tangga yang tak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan

I_{DOC} = Populasi per dokter disesuaikan dengan kepadatan penduduk

I_{IMM} = Persentase anak tanpa imunisasi lengkap

I_{WAT} = Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

I_{AHH} = Angka Harapan Hidup

I_{NUT} = Persentase anak dengan berat badan di bawah standar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Ketahanan Pangan

Peta Ketahanan Pangan di Kecamatan Lima Puluh memberi makna, bahwa Kecamatan Lima Puluh secara umum berada pada kategori “prioritas 5” atau ”tahan pangan” dengan indeks komposit 0,171 – 0,276.

Berdasarkan indeks gabungan ketahanan pangan, penggolongan tingkat ketahanan pangan untuk 35 desa di Lima Puluh adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Penggolongan Tingkat Ketahanan Pangan Desa Di Kecamatan Lima Puluh

No	DESA	INDEKS KETAPANG	TKT KETAHANAN PANGAN		RKG PRTS
			STATUS	KT PRIORITAS	
1	Kelurahan Limapuluh	0,202	TAHAN	PRIORITAS 5	20
2	Antara	0,192	TAHAN	PRIORITAS 5	29
3	Perk Kuala Gunung	0,212	TAHAN	PRIORITAS 5	15
4	Desa Kuala Gunung	0,205	TAHAN	PRIORITAS 5	19
5	Perk Limau Manis	0,189	TAHAN	PRIORITAS 5	31
6	Sumber Padi	0,191	TAHAN	PRIORITAS 5	30
7	Sumber Rejo	0,195	TAHAN	PRIORITAS 5	24
8	Perk Dolok Estate	0,182	TAHAN	PRIORITAS 5	34
9	Mangkai Lama	0,194	TAHAN	PRIORITAS 5	26
10	Mangkai Baru	0,196	TAHAN	PRIORITAS 5	23
11	Sumber Makmur	0,184	TAHAN	PRIORITAS 5	33
12	Perk Lima Puluh	0,171	TAHAN	PRIORITAS 5	35
13	Perk Tanah Gambus	0,209	TAHAN	PRIORITAS 5	16
14	Simpang Gambus	0,227	TAHAN	PRIORITAS 5	8
15	Empat Negeri	0,201	TAHAN	PRIORITAS 5	21
16	Lubuk Besar	0,208	TAHAN	PRIORITAS 5	17
17	Lubuk Hulu	0,205	TAHAN	PRIORITAS 5	18
18	Perk Tanah Itam Ulu	0,216	TAHAN	PRIORITAS 5	12
19	Tanah Itam Ilir	0,196	TAHAN	PRIORITAS 5	22
20	Pulau Sejuk	0,193	TAHAN	PRIORITAS 5	28
21	Simp. Dolok	0,185	TAHAN	PRIORITAS 5	32
22	Cahaya Pardomuan	0,212	TAHAN	PRIORITAS 5	14
23	Air Hitam	0,228	TAHAN	PRIORITAS 5	7
24	Barung-Barung	0,216	TAHAN	PRIORITAS 5	11
25	Pasir Permit	0,213	TAHAN	PRIORITAS 5	13
26	Pematang Panjang	0,228	TAHAN	PRIORITAS 5	6
27	Gunung Bandung	0,218	TAHAN	PRIORITAS 5	10
28	Titi Merah	0,228	TAHAN	PRIORITAS 5	5
29	Titi Putih	0,228	TAHAN	PRIORITAS 5	4
30	Bulan Bulan	0,193	TAHAN	PRIORITAS 5	27
31	Lubuk Cuik	0,194	TAHAN	PRIORITAS 5	25
32	Pematang Tengah	0,231	TAHAN	PRIORITAS 5	3
33	Gambus Laut	0,262	TAHAN	PRIORITAS 5	2
34	Perupuk	0,276	TAHAN	PRIORITAS 5	1
35	Guntung	0,221	TAHAN	PRIORITAS 5	9

Aspek Ketersediaan Pangan

Situasi ketersediaan pangan di Kecamatan Lima Puluh secara umum berada pada kategori “prioritas 1” atau ”defisit tinggi” (merah tua) dan “prioritas 6” atau “surplus tinggi”. Terdapat 11 desa yang berada pada “prioritas 1” atau “defisit tinggi”, 23 desa pada “prioritas 6” atau “surplus tinggi” dan 1 desa berada pada “prioritas 5” atau “surplus sedang”.

Berdasarkan dimensi Ketersediaan Pangan, ada 11 (sebelas)desa yang tergolong defisit ketersediaan pangan tinggi dibanding desa lainnya karena indeks kompositnya lebih besar (lebih buruk) yaitu 0,97, yang mana daerah-daerah tersebut merupakan desa yang tidak menghasilkan panganan pokok berupa gabah dan umbi-umbian.

Tabel 4. Penggolongan Desa Berdasarkan Dimensi Ketersediaan Pangan Di Kecamatan Lima Puluh

No	DESA	$F = \frac{P_{food}}{pop \times 365}$	$R_{CONS} = \frac{C_{norm}}{F}$	STATUS	TINGKAT PRIORITAS	I_{AV}
1	Kelurahan Limapuluh	0,00	300,00	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,97
2	Antara	643,51	0,47	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
3	Perk Kuala Gunung	0,00	300,00	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,97
4	Desa Kuala Gunung	2.859,31	0,10	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
5	Perk Limau Manis	0,00	300,00	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,97
6	Sumber Padi	7,98	37,58	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,82
7	Sumber Rejo	3.742,42	0,08	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
8	Perk Dolok Estate	0,00	300,00	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,97
9	Mangkai Lama	1.445,27	0,21	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
10	Mangkai Baru	2.426,10	0,12	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
11	Sumber Makmur	6.005,87	0,05	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
12	Perk Lima Puluh	1.137,11	0,26	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
13	Perk Tanah Gambus	4,16	72,11	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,84
14	Simpang Gambus	2,49	120,40	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,87
15	Empat Negeri	1.085,71	0,28	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
16	Lubuk Besar	926,19	0,32	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
17	Lubuk Hulu	14,57	20,58	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,81
18	Perk Tanah Itam Ulu	2.151,16	0,14	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
19	Tanah Itam Ilir	2.379,82	0,13	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
20	Pulau Sejuk	850,53	0,35	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
21	Simp. Dolok	1.047,17	0,29	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
22	Cahaya Pardomuan	3.128,05	0,10	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
23	Air Hitam	6.676,88	0,04	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
24	Barung-Barung	0,00	300,00	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,97
25	Pasir Permit	2.610,62	0,11	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
26	Pematang Panjang	658,23	300,00	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,97
27	Gunung Bandung	2.944,57	0,10	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
28	Titi Merah	784,88	0,38	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
29	Titi Putih	1.558,18	0,19	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
30	Bulan Bulan	169,98	1,76	Defisit Tinggi	PRIORITAS 1	0,80
31	Lubuk Cuik	1.219,92	0,25	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80

32	Pematang Tengah	15.627,76	0,02	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
33	Gambus Laut	2.996,01	0,10	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
34	Perupuk	2.402,95	0,12	Surplus Tinggi	PRIORITAS 6	0,80
35	Guntung	435,07	0,69	Surplus Sedang	PRIORITAS 5	0,80

Aspek Akses Pangan

Akses Terhadap Pangan secara umum menggambarkan Kecamatan Lima Puluh berada pada kategori "sangat tahan" atau "prioritas 6". Seluruh desa berada pada kategori ini.

Berdasarkan data yang diperoleh pada dimensi akses pangan, indikator rumah tangga tanpa akses listrik dan desa yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 bukan lagi menjadi masalah utama, karena seluruh desa di Kecamatan Lima Puluh sudah mendapatkan akses listrik dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Meskipun secara umum dimensi akses pangan di Kecamatan Lima Puluh termasuk kategori "sangat tahan", tetapi indikator persentase penduduk miskin dan persentase kepala keluarga tidak tamat pendidikan dasar masih perlu diturunkan persentasenya agar dimensi akses pangan di Kecamatan Lima Puluh semakin tahan untuk waktu ke depan.

Tabel 5. Penggolongan Desa Berdasarkan Akses Pangan Dan Penghidupan Di Kecamatan Lima Puluh

No.	DESA	AKSES PANGAN DAN PENGHIDUPAN		
		I _{FA}	STATUS	TINGKAT PRIORITAS
1	Kelurahan Limapuluh	0,01	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
2	Antara	0,03	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
3	Perk Kuala Gunung	0,09	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
4	Desa Kuala Gunung	0,04	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
5	Perk Limau Manis	0,03	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
6	Sumber Padi	0,02	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
7	Sumber Rejo	0,05	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
8	Perk Dolok Estate	0,03	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
9	Mangkai Lama	0,02	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
10	Mangkai Baru	0,02	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
11	Sumber Makmur	0,03	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
12	Perk Lima Puluh	0,01	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
13	Perk Tanah Gambus	0,01	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
14	Simpang Gambus	0,03	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
15	Empat Negeri	0,03	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
16	Lubuk Besar	0,04	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
17	Lubuk Hulu	0,04	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
18	Perk Tanah Itam Ulu	0,01	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
19	Tanah Itam Ilir	0,05	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
20	Pulau Sejuk	0,03	Sangat Tahan	PRIORITAS 6

21	Simp. Dolok	0,01	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
22	Cahaya Pardomuan	0,04	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
23	Air Hitam	0,05	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
24	Barung-Barung	0,06	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
25	Pasir Permit	0,07	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
26	Pematang Panjang	0,04	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
27	Gunung Bandung	0,07	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
28	Titi Merah	0,11	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
29	Titi Putih	0,10	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
30	Bulan Bulan	0,03	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
31	Lubuk Cuik	0,04	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
32	Pematang Tengah	0,06	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
33	Gambus Laut	0,06	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
34	Perupuk	0,06	Sangat Tahan	PRIORITAS 6
35	Guntung	0,06	Sangat Tahan	PRIORITAS 6

Aspek Pemanfaatan Pangan

Berdasarkan data yang diperoleh pada dimensi pemanfaatan pangan, seluruh desa telah berada pada kategori “tahan pangan”. Namun demikian, untuk meningkatkan status dimensi pemanfaatan pangan pada kategori yang lebih baik yaitu “sangat tahan pangan” maka tiap-tiap indikator perlu diperbaiki. Ada 3 indikator yang sudah sangat baik, yaitu indikator rumah tangga tanpa akses air bersih, rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan, dan populasi penduduk per dokter. Sedangkan 4 indikator lainnya yaitu angka harapan hidup, anak balita dengan berat badang kurang dari standar, perempuan buta huruf dan balita tidak diimmunisasi lengkap juga sudah baik, namun akan lebih baik jika persentasenya dapat diturunkan hingga 0%.

Tabel 6. Penggolongan Desa Berdasarkan Dimensi Pemanfaatan Pangan Di Kecamatan Lima Puluh

No.	DESA	PEMANFAATAN PANGAN		
		I _{FU}	STATUS	TINGKAT PRIORITAS
1	Kelurahan Limapuluh	0,200	TAHAN	PRIORITAS 5
2	Antara	0,198	TAHAN	PRIORITAS 5
3	Perk Kuala Gunung	0,177	TAHAN	PRIORITAS 5
4	Desa Kuala Gunung	0,214	TAHAN	PRIORITAS 5
5	Perk Limau Manis	0,173	TAHAN	PRIORITAS 5
6	Sumber Padi	0,197	TAHAN	PRIORITAS 5
7	Sumber Rejo	0,192	TAHAN	PRIORITAS 5
8	Perk Dolok Estate	0,162	TAHAN	PRIORITAS 5
9	Mangkai Lama	0,202	TAHAN	PRIORITAS 5
10	Mangkai Baru	0,211	TAHAN	PRIORITAS 5
11	Sumber Makmur	0,185	TAHAN	PRIORITAS 5

12	Perk Lima Puluh	0,171	TAHAN	PRIORITAS 5
13	Perk Tanah Gambus	0,230	TAHAN	PRIORITAS 5
14	Simpang Gambus	0,242	TAHAN	PRIORITAS 5
15	Empat Negeri	0,211	TAHAN	PRIORITAS 5
16	Lubuk Besar	0,221	TAHAN	PRIORITAS 5
17	Lubuk Hulu	0,211	TAHAN	PRIORITAS 5
18	Perk Tanah Itam Ulu	0,245	TAHAN	PRIORITAS 5
19	Tanah Itam Ilir	0,196	TAHAN	PRIORITAS 5
20	Pulau Sejuk	0,198	TAHAN	PRIORITAS 5
21	Simp. Dolok	0,196	TAHAN	PRIORITAS 5
22	Cahaya Pardomuan	0,225	TAHAN	PRIORITAS 5
23	Air Hitam	0,246	TAHAN	PRIORITAS 5
24	Barung-Barung	0,202	TAHAN	PRIORITAS 5
25	Pasir Permit	0,213	TAHAN	PRIORITAS 5
26	Pematang Panjang	0,230	TAHAN	PRIORITAS 5
27	Gunung Bandung	0,219	TAHAN	PRIORITAS 5
28	Titi Merah	0,214	TAHAN	PRIORITAS 5
29	Titi Putih	0,220	TAHAN	PRIORITAS 5
30	Bulan Bulan	0,201	TAHAN	PRIORITAS 5
31	Lubuk Cuik	0,197	TAHAN	PRIORITAS 5
32	Pematang Tengah	0,246	TAHAN	PRIORITAS 5
33	Gambus Laut	0,294	TAHAN	PRIORITAS 5
34	Perupuk	0,318	TAHAN	PRIORITAS 5
35	Guntung	0,232	TAHAN	PRIORITAS 5

Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pangan di Kecamatan Lima Puluh

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap kebijakan ketahanan pangan di kecamatan Lima Puluh adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator ketersediaan pangan dapat dilakukan peningkatan produksi, produktivitas, distribusi, dan konsumsi pangan daerah. Adapun kebijakan yang dapat mendukung peningkatan produksi, produktivitas, distribusi dan konsumsi pangan tersebut adalah dengan cara :
 - Pemantapan penyediaan dan peyaluran sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan dan alsintan)
 - Pengembangan cadangan dan lumbung padi di setiap desa
 - Pemantapan dan penyediaan kredit modal, peningkatan mutu teknologi
 - Pemberdayaan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani (koperasi pertanian)
 - Peningkatan mutu teknologi produksi tanaman pangan pokok
 - Peningkatan kinerja penyuluh pertanian
 - Mengembangkan kemitraan dan pemasaran hasil

- Peningkatan infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi yang optimal
 - Peningkatan jumlah toko/warung terutama di desa-desa yang bukan sentra produksi tanaman pangan
2. Untuk indikator kemiskinan, kebijakan yang dapat disarankan adalah :
 - Menciptakan lapangan kerja dengan mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Lima Puluh
 - Peningkatan efektifitas program beras untuk keluarga miskin (raskin),
 - Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Penerapan energi alternatif untuk akses listrik maupun gas
 - Peningkatan pelayanan listrik pedesaan
 - Pengembangan (pembangunan dan rehabilitasi) sarana dasar, jalan desa dan jalan usahatani
 3. Untuk indikator imunisasi lengkap bagi balita dan berat badan balita di bawah standar, kebijakan yang dapat disarankan adalah :
 - Pemeriksaan yang teratur untuk pertumbuhan anak
 - Pendidikan gizi dan kesehatan yang tepat untuk ibu
 - Perancangan program operasi pasar khusus dengan memproduksi makanan lokal yang difortifikasi
 - Membentuk dan meningkatkan pelayanan puskesmas dan posyandu
 - Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman sejak Anak Usia Dini.
 4. Untuk indikator perempuan buta huruf, dapat dilakukan :
 - Pemetaan jumlah penyandang buta huruf secara tepat
 - Perluasan informasi dan sosialisasi tentang pentingnya melek huruf
 - Pemberdayaan sekolah formal dan nonformal bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat
 5. Untuk indikator angka harapan hidup, dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan dengan kualitas dan kuantitas yang baik pada waktu yang tepat.

6. Dengan diperolehnya indikator-indikator sebagai faktor penyebab ketidaktahanan pangan pada desa-desa di kecamatan Lima Puluh, diharapkan pemerintah dapat melakukan penanggulangan ketidaktahanan pangan. Untuk itu sangat diperlukan kerjasama kolektif lintas sektoral, karena lingkup dan komponen permasalahan ketahanan pangan sangat luas dan kompleks. Adapun hal-hal yang dapat menjadi perhatian instansi terkait penanganan kerawanan pangan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pengamatan dini kerawanan pangan serta mengembangkan cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat (bencana alam, kerawanan pangan kronis dan lain-lain), yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat minimal 3 (tiga) bulan.
- Peningkatan kemampuan fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- Peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menstabilkan harga bahan pangan.
- Melakukan upaya-upaya diversifikasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta aman, sesuai dengan kondisi dan situasi daerah, dengan mengutamakan sumber pangan lokal untuk mencegah ketergantungan terhadap satu jenis pangan tertentu sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH).
- Penurunan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat dengan meningkatkan konsumsi pangan hewani dan ikan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang (3 B).
- Peningkatan pengembangan keamanan mutu dan gizi pangan.
- Mengembangkan Desa Mandiri Pangan dan menggalang sumber-sumber dana masyarakat yang memadai.
- Mendorong Koordinasi Program Ketahanan Pangan lintas Sektor dan Lintas Daerah.
- Meningkatkan Peranan Kelembagaan Formal dan Informal dalam Pelaksanaan Ketahanan Pangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kecamatan Lima Puluh secara umum berada pada kategori “tahan pangan” dengan indeks komposit 0,171-0,276. Adapun desa yang paling menjadi prioritas untuk dibangun adalah desa Perupuk dengan indeks komposit tertinggi yaitu 0,276, disebabkan persentasi balita yang tidak diimmunisasi lengkap dan penduduk miskin yang tinggi
2. Alternatif rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap desa. Secara umum yaitu peningkatan produksi, produktivitas dan distribusi pangan di setiap desa, bagi desa-desa yang bukan sentra penghasil panganan pokok harus disediakan toko dan warung yang cukup untuk distribusi bahan pangan yang merata. Harus dilakukannya kerjasama kolektif lintas sektoral untuk memperbaiki kondisi ketahanan pangan di Kecamatan Lima Puluh, menciptakan lapangan kerja dengan mengundang investor untuk menanamkan modal di kecamatan Lima Puluh dan kebijakan terkait pemberian pendidikan kesehatan bagi ibu rumah tangga

Saran

Adapun saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada masyarakat di Kecamatan Lima Puluh agar turut serta meningkatkan konsumsi pangan lokal, berinovasi menciptakan menu pangan lokal yang beragam, bergizi dan berimbang. Kepada para pedagang juga diharapkan agar memprioritaskan produksi lokal dari daerah dan atau daerah lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memfokuskan pembangunan ketahanan pangan di daerah-daerah prioritas 1 dan lebih meningkatkan kerjasama lintas sektoral terkait agar lebih terintegrasi dalam pemerataan pembangunan ketahanan pangan di Kecamatan Lima Puluh. Pemerintah juga diharapkan melakukan upaya promosi panganan lokal dengan bekerja sama dengan pengelola hotel, restoran, dan rumah makan, mengembangkan produksi pangan lokal daerah, dan memperkenalkan sumber daya panganan lokal dari berbagai provinsi di tanah air pada hari-hari perayaan pangan.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar memasukkan komponen aspek kerawanan pangan transien dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguno, Rhemo. 2014. *Analisis Akses dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara : Medan.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013. *Profil Kependudukan dan Pengembangan di Indonesia Tahun 2013*. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2015. *Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Papua*. Pemerintah Provinsi Papua : Papua.
- _____. 2016. *Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran*. Kementrian Pertanian : Jakarta.
- Panggabean, Sartika F.T. 2013. *Analisis Kerawanan Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2011*. Skripsi Institut Pertanian Bogor : Bogor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Sembiring, H. 2015. *Peran Ilmu Tanah Dalam Ketahanan Pangan dan Ene*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Kongres HITI 11 Malang, 28-31 Oktober 2015.
- Suryana. 2004. *Ketahanan Pangan Indonesia*. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Jakarta.
- Suyana, A. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. BPFE : Yogyakarta.